

UPAYA DESA API-API DALAM MENJADI DESA TERBAIK SE KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2012

Penulis: ISKANDARSYAH
0801134226

E-mail: . iskandarsyah40@yahoo.com

Dosen Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si.
Jurusan Ilmu Pemerintahan-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl H.R Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 28293.
Telp/Fax 0761-63277

ABSTRACT

This study examines the efforts of the village in the Api-Api be the best village of Se Bengkalis in 2012 and are the focus of this study is what the efforts made Village Api-Api to be the best village of Se Kabupaten Bengkalis. In this research using descriptive qualitative method, is the effort to collect, collate and interpret existing data and then analyze the data, examine, describe and examine more clearly from a variety of factors related to the conditions, situations and phenomena were investigated. This research method could certainly describe the journey of an idea or thought involved in matters that are limited in this study. This study used an interview with the informant as an object in this study. The type of data used in this study are primary data and secondary data.

The results showed in the efforts undertaken by the Village Api-Api, there are some attempts by Api-Api village as in the health sector efforts made increase knowledge and awareness of village communities on health, immunization, education efforts made to provide scholarships to needy households, facilitate the maintenance of poor letter, in the field of institutional efforts made to provide facilities infrastructure, in the areas of village government efforts made to foster employee discipline, education and training, in the field of community economic assistance efforts of the agricultural infrastructure, fostering , direct and control of agricultural products with the help of the Department of agriculture.

Keywords: effort, village administration, policy, coordination.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan dasar Pancasila sebagai ideologi Negara, falsafah Bangsa dan Negara adalah merupakan prinsip dasar dan landasan pijak yang sangat penting bagi seluruh potensi dan komponen Bangsa dalam mewujudkan cita-cita Bangsa dan Negara Indonesia yaitu terciptanya

Negara yang berkembang, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut azas desentralisasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dengan memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah

Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah-daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah tercantum dalam UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, berdasarkan adat istiadat, asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bawah Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 202:

1. Pemerintah Desa terdiri atas kepala Desa dan perangkat Desa.
2. Perangkat Desa terdiri dari sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.
3. Sekretaris Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.
4. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 masyarakat diharapkan lebih otonom dan demokratis. Segala sesuatu yang berkaitan dengan masa depan desa nya akan

ditentukan sendiri oleh masyarakat Desa. Untuk itu semua pihak dilibatkan dalam rangka pembangunan Desanya agar lebih maju. Maka untuk mengoptimalkan pemerintahan di Desa perlu proaktif Pemerintah Desa dalam membina masyarakat khususnya dalam membangun sarana dan prasarana Desa.

Oleh karena itu kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisah dari kebijakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang diletakkan di Daerah Kabupaten dan Kota.

Bertitik tolak pada hal tersebut diatas, bahwa salah satu upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat adalah melalui pemberdayaan masyarakat, berdasarkan peraturan tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten, dibentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Menurut Peraturan daerah kabupaten bengkalis Nomor 10 tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis pasal 9 tentang tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa:

1. Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun rencana strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.
2. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah bidang pengembangan tahanan masyarakat, sosial budaya masyarakat, pengembangan usaha ekonomi desa dan teknologi tepat guna serta pembinaan Pemerintahan Desa.
4. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.
5. Melaksanakan kegiatan penatausahaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis badan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada tanggal 22 April 2012 Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (BPMPD) mengadakan seleksi Desa untuk menjadi desa terbaik sekabupaten Bengkulu, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kesehatan.

2. Pendidikan.
3. Kelembagaan.
4. Pemerintah Desa
5. Ekonomi masyarakat.

Tujuan mengadakan ini dimaksud supaya setiap Desa dapat berkontribusi dalam menunjang pembangunan dan pemerintahan Desa menjadi yang lebih baik.

Dari 8 Desa se Kabupaten Bengkulu yang mengikuti, maka Desa Api-Api keluar sebagai pemenang dan mendapatkan penghargaan sebagai desa terbaik sekabupaten pada tanggal 17 Agustus 2012.

Berdasarkan pengamatan awal yang telah penulis lakukan, ada beberapa upaya Desa Api-Api untuk bisa menjadi Desa terbaik se Kabupaten Bengkulu, baik dari segi kesehatan, pendidikan, kelembagaan, pemerintah Desa, dan ekonomi masyarakat.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang di uraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah, yakni *Apa Upaya Desa Api-Api Dalam Menjadi Desa Terbaik Se Kabupaten Bengkulu?*

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Upaya Desa Api-Api Dalam Menjadi Desa terbaik Se Kabupaten Bengkulu tahun 2012.

b. manfaat penelitian

1. Manfaat Akademik
 - a. Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang membahas pada persoalan yang sama.
 - b. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang membahas upaya desa api-api dalam mencapai kemenangan

perlombaan desa terbaik sekabupaten bengkalis tahun 2012.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan bagi pembuat kebijakan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Sebagai input bagi Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (BPMPD), untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Kerangka Teori

a. Kewenangan

Menurut The Liang Gie mengatakan bahwa wewenang merupakan kekuasaan yang sah untuk memerintah orang lain untuk melaksanakan sendiri suatu pekerjaan. Dalam organisasi, wewenang itu merupakan suatu kesatuan dengan tugas dan lahir dari tugas itu sendiri. Penyerahan tugas kepada seorang pejabat sekaligus berarti pemberian wewenang yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. (The Liang Gie, 1994; 82).

Sedangkan menurut Ridwan HR, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara. (Ridwan HR, 2006; 100)

Selanjutnya menurut Ramlan Surbakti (1992:86) ada lima sumber kewenangan untuk memerintah, yakni:

1. Hak memerintah berasal dari tradisi, artinya kepercayaan yang telah berakar dipelihara secara terus menerus dalam masyarakat yang berwujud keyakinan bahwa yang ditakdirkan menjadi pemimpin masyarakat ialah dari keluarga tertentu (darah biru)

2. Hak memerintah berasal dari tuhan, dewa, atau wahyu, maksudnya kewenangannya untuk memerintah masyarakat berasal dari kekuatan yang sakral.

3. Hak memerintah berasal dari kualitas pribadi sang pemimpin, baik penampilannya yang agung dan diri pribadinya yang populer, maupun karena memiliki karisma.

4. Hak memerintah masyarakat berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat-syarat menjadi pemimpin pemerintahan.

5. Hak memerintah berasal dari sumber yang bersifat instrumental seperti keahlian dan kekayaan. Keahlian yang dimaksud terletak pada keahlian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekayaan yang di maksud adalah pemilikan uang, tanah, barang-barang berharga, surat-surat berharga, sarana dan alat produksi.

Tujuan peletakan wewenang dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Kewenangan Pemerintahan Daerah dilaksanakan secara luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.

b. Kebijakan.

Menurut Ealau dan Pewitt (1973) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. "merintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan".

Sedangkan menurut Edi Suharto (2008:7) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan beberapa defenisi tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan adalah suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat disini merupakan keseluruhan kepentingan yang penting dari perpaduan pendapat, keinginan, dan tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah.

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah, dimana dilaksnakan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan untuk memecahkan permasalahan.

Perumusan kebijakan harus dilandasi dengan pengetahuan atau kondisi sosial ekonomi rakyat, potensi, permasalahan dan kemungkinan-kemungkinannya. Menurut Bintaro dalam kebijakan kita harus memilih-milih masalah dengan berbagai alternatif-alternatif fundamental, seperti:

1. Kebijakan dalam tujuan ditekankan laju pertumbuhan yang tinggi atau kepada keadilan sosial.
2. Kebijakan ekonomi ditekankan pada peningkatan produksi dan produktifitas atau kepada perluasan kesempatan kerja.
3. Kebijakan dalam pembangunan ditekankan pada daerah-daerah tertentu yang mempunyai potensi pembangunan besar atau pemerataan pembangunan diberbagai daerah.

4. Kebijakan dalam industri ditekankan pada orientasi ekspor atau berorientasi kepada pasar dalam negeri.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Kebijakan dapat diwujudkan dengan cara; Pembuatan Peraturan UU, Perencanaan Kegiatan, Aneka intervensi terhadap ekonomi/social masyarakat. Karena kebijakan itu merupakan tindakan dan keputusan pemerintah maka kebijakan tersebut dicirikan dengan kekuasaan yang didominasi oleh pemerintah serta sesuai hukum dan wewenang pemerintah.

c. Koordinasi.

Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa :“Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”.

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yangterpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko 2003 : 195).

Menurut E. F. L. Brech dalam bukunya, *The Principle and Practice of Management* Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri.

Menurut Sondang P. Siagian, M.P.A., Ph.D dalam bukunya peranan staf dalam manajemen. 1978. "Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin".

Menurut G. R. Terry dalam bukunya, *Principle of Management* : Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron/teratur untuk menyediakan jumlah, waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Menurut tinjauan manajemen, koordinasi menurut Terry meliputi:

1. Jumlah usaha baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif.
2. Waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut.
3. Directing atau penentuan arah usaha-usaha tersebut.

a) Syarat-syarat koordinasi:

1. *Sense of Cooperation*, perasaan untuk saling bekerja sama, dilihat per bagian.
2. *Rivalry*, dalam perusahaan besar, sering diadakan persaingan antar bagian, agar

saling berlomba untuk kemajuan.

3. *Team Spirit*, satu sama lain per bagian harus saling menghargai.
4. *Esprit de Corps*, bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat.

b) Sifat-sifat koordinasi:

1. Koordinasi adalah dinamis, bukan statis.
2. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer dalam kerangka mencapai sasaran.
3. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

b) Koordinasi dibedakan atas :

1. Koordinasi vertikal, tindakan-tindakan atau kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan atas kegiatan unit-unit, kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya.

2. Koordinasi horisontal, tindakan-tindakan atau kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan terhadap kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat.

1. Koordinasi horisontal terbagi :

- a. *Interdisciplinary*, Koordinasi dalam rangka pengarahan, menyatukan tindakan, mewujudkan, menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya.

- b. *Inter-Related*, koordinasi antar badan (instansi). Unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansinya saling berkaitan secara intern-ekstern yang selevel.

2. Cara mengadakan koordinasi :
 - a. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan, menghasilkan koordinasi yang diharapkan.
 - b. Mensosialisasikan tujuan kepada para anggota, agar tujuan tersebut berjalan secara bersama, tidak sendiri-sendiri.
 - c. Mendorong anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide.
 - d. Mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran.
3. Koordinasi dan Cooperation :
 - a. Koordinasi berhubungan dengan sinkronisasi, jumlah, waktu, arah dan mempunyai arti lebih luas daripada kooperasi.
 - b. Kooperasi adalah tindakan bersama oleh sejumlah orang terhadap tujuan yang sama.

5. Metode Penelitian

a. Jenis Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analitis, yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki (Lexi J. Moleong, 2000:30). Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan atau pemikiran yang terkait

dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

b. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Lokasi ini diambil sesuai dengan topik yang menjadi penelitian. Dengan pertimbangan untuk mengetahui apa upaya Desa Api-Api dalam menjadi Desa terbaik se kabupaten Bengkalis tahun 2012

c. Jenis atau Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa :

- a. Data primer: yaitu data yang diperoleh langsung diambil berdasarkan sumbernya. Data tersebut berupa jawaban dari wawancara dengan pihak Pemerintah Desa Api-Api.

Data primer dalam penelitian ini adalah :

- Keterangan informan mengenai upaya Desa Api-Api dalam menjadi Desa terbaik se kabupaten Bengkalis.
- Data sekunder: Berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip, laporan, peta, peraturan perundang-undangan, buku-buku yang menyangkut data mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

B. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 bahwa pemerintah desa mempunyai tugas penyelenggaraan urusan

pemerintahan, pembangunan dan masyarakat.

d. Informan

Untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan dengan wawancara mendalam. Informan dipilih berdasarkan penarikan sampel nonprobabiliti yaitu dengan cara *Sampling Purposive* berdasarkan atas pertimbangan pengumpul data sesuai dengan maksud dan tujuan. (Sukandarrumidi, 2004: 65) Dalam sampling purposif, pertimbangan peneliti memegang peranan, bahkan menentukan dalam pengambilan sekumpulan obyek untuk diteliti. Jelas bahwa nilai penelitian yang diperoleh berdasarkan sampel ini tergantung pada peneliti yang memberi pertimbangan. (Syarifudin Hidayat, 2002: 131-132).

Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel yang telah dibuat berikut ini.

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Khairil Anwar	Kepala Desa	1
2	Samsinar S.sos	Sekretaris Desa	1
3	Darwito	Ketua Bpd	1
4	ismail	Kepala BPMPD	1
JUMLAH			4

Sumber : Data Olahhan Lapangan

e. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu peneliti mengadakan tanya jawab terhadap informan guna memperoleh data dan informasi mengenai Upaya Desa Api-Api Dalam Mencapai Kemenangan Perlombaan Desa Terbaik Sekabupaten Bengkalis.

b. Observasi

Yaitu dimana peneliti mendapatkan data berdasarkan hasil pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala mengenai Upaya Desa Api-Api Dalam Mencapai Kemenangan Perlombaan Desa Terbaik Sekabupaten Bengkalis.

c. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti (Widodo, 2004: 50).

f. Analisa Data

Setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisa secara kualitatif dan akan dihubungkan dengan teori-teori yang ada. Kemudian akan dituangkan dalam bentuk paparan atau deskriptif. Analisis kualitatif fokusnya pada penunjukkan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing, dan sering kali melukiskannya didalam kata-kata daripada didalam angka-angka.

Untuk maksud tersebut, data tentu saja perlu disusun kedalam pola tertentu, kategori tertentu, fokus tertentu, tema tertentu, atau pokok permasalahan tertentu. Oleh karena itu, setiap catatan harian yang dihasilkan dalam pengumpulan data, perlu direduksi dan dimasukkan kedalam pola, kategori, fokus, atau tema tertentu yang sesuai. (Lexy J, Moleong, 2000:30).

6. Hasil Penelitian : Upaya Desa Api-Api Dalam Menjadi Desa Terbaik Se Kabupaten Bengkalis Tahun 2012.

1. Kesehatan

Pada tahun 2010 Masyarakat Desa Api – Api yang menderita penyakit sekitar 1,78%, pada

tahun 2011 Masyarakat Desa Api – api yang menderita penyakit menurun sekitar 1,45%. Dapat dilihat bahwa dari tahun 2010 sampai tahun 2011 masyarakat Desa api – api yang menderita penyakit menurun.

Pembinaan dalam bidang kesehatan adalah Kegiatan posyandu yang ada di Desa Api-Api berjalan dengan baik, hal ini terbukti adanya kegiatan posyandu balita dan ibu hamil yang dilakukan setiap 1 bulan sekali di posyandu di tiap dusun sedangkan untuk kegiatan posyandu lansia diadakan 2 bulan sekali hal ini dikarena posyandu lansia hanya berjumlah 1. Kegiatan posyandu tersebut mempunyai banyak manfaat bagi kaum ibu-ibu, lansia wanita serta anak-anak balita, selain mendapatkan informasi tentang kesehatan mereka juga bisa mendapatkan pengobatan gratis.

Upaya lain yang dilakukan masyarakat Desa Api Api adalah dengan menjaga kesehatan dan menerapkan hidup sehat kepada anggota keluarganya, pencegahan penyakit melalui imunisasi pada ibu hamil, bayi dan anak, pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran lingkungan serta perlindungan masyarakat terhadap penyakit, memberi pengobatan bagi penduduk yang sakit. Pemerintah Desa juga melengkapi sarana dan prasarana yang lengkap di Desa Api – Api.

Meningkatnya kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk hidup

sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat serta terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mendorong terbentuknya kemampuan tersebut. Oleh karena itu, saat ini pemerintah lebih memfokuskan perhatiannya kepada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa terhadap kesehatan.

Paradigma sehat merupakan strategi pembangunan kesehatan, dimana mengarah kepada mempertahankan kondisi sehat. Dalam upaya kesehatan program yang diperlukan adalah program kesehatan yang mempunyai model- model pembinaan kesehatan.

2. Pendidikan

Dari tahun ke tahun kesadaran Masyarakat Desa api – Api tentang pendidikan sangat tinggi, ini di karenakan masyarakat sadar bahwa ilmu pengetahuan sangat penting untuk ke depannya,

Pembinaan dalam bidang pendidikan, Pemerintah Desa Api-Api melakukan pembinaan dibidang pendidikan dengan peningkatan sarana pendidikan salah satunya penambahan lokal (Kelas) PAUD yang ada di Desa Api-Api. selain itu Pemerintah Desa Api-Api dalam mensukseskan program belajar 9 tahun memberikan kemudahan kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam proses pengurusan surat-surat keterangan tidak mampu agar masyarakat tersebut bisa lebih semangat dalam menyekolahkan anaknya.

Upaya lain yang dilakukan Desa Api – Api dalam meningkatkan kesadaran tentang pendidikan adalah Pemerintah Desa memberikan bantuan dana berupa beasiswa bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu dan berprestasi. Ini sangat membantu untuk melanjutkan pendidikannya dan yang berprestasi lebih termotivasi lagi belajar dan menambah ilmu yang lebih banyak. Pemerintah Desa Api – Api juga membangun perpustakaan Desa.

Tabel 3.1. Jumlah Masyarakat Desa Api-Api yang sekolah

No	Pendidikan	Tahun 2010	Tahun 2011
1	TK	55 orang	59 orang
2	SD	55 orang	73 orang
3	SLTP	130 orang	185 orang
4	SLTA	135 orang	161 orang
5	S1	15 orang	23 orang
	Jumlah	390 orang	501 orang

Sumber : Kantor Desa Api-Api, 2010-2011

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sudah banyak masyarakat Desa Api – Api yang sadar dan mampu untuk bersekolah. Pendidikan merupakan suatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tingkat pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal sangat mempengaruhi pola pikir dan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan. Tingkat pendidikan akhirnya juga akan mempengaruhi kesejahteraan. Semakin tinggi tingkat pendidikan

seseorang, maka diharapkan semakin meningkat pula kesejahteraan.

3. Kelembagaan

Kelembagaan di suatu Desa ini sangat penting, karena lembaga Desa juga membantu Pemerintah Desa dalam terciptanya pembangunan yang lancar dalam suatu Desa. Supaya kelembagaan di Desa Api – Api bisa bekerja dengan baik, maka upaya yang dilakukan Desa Api – Api adalah memberikan sarana dan prasarana yang lengkap, salah satu contoh adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada tahun 2010 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak memiliki kantor sendiri, kantornya masih bergabung dengan kantor desa. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sulit untuk melakukan tugas dan fungsinya.

Tapi pada tahun 2011 sampai sekarang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah memiliki kantor sendiri dan tidak lagi berada dalam badan kantor Desa. Jadi mengenai semua urusan administrasi bisa menjadi lancar dan bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan lancar, tidak seperti tahun 2010.

4. Pemerintah Desa

Dari segi Pemerintah Desa upaya yang dilakukan Desa Api – Api adalah dengan membangun sarana dan prasarana Pemerintah Desa, seperti : membangun Kantor Desa menjadi lebih luas, melengkapi fasilitas peralatan kantor, dan staf..

Dari segi kinerja dan pelayanan di Pemerintah Desa, upaya yang dilakukan adalah:

1. Pembinaan Disiplin Aparat Desa

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Aparat Desa dalam melaksanakan tugas pokoknya dan fungsi organisasi

adalah melalui pembinaan disiplin. Adapun bentuk penerapan disiplin Aparat Desa pada Desa Api – Api adalah pembinaan disiplin waktu kerja, pelayanan yang baik dan cepat.

2. Pendidikan Dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk memberdayakan aparat, terutama untuk meningkatkan kemampuan intelektual dengan kepribadian manusia. Ini bertujuan supaya mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik yang dibebankan kepadanya tanpa arahan langsung dari pihak atasannya.

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yaitu pada pasal 208 “Tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

Pemerintah Desa merupakan simbol formil kesatuan masyarakat desa, sebagai badan kekuatan terendah, Pemerintah Desa dalam fungsi kepemimpinan memiliki berbagai fungsi untuk mengatur masyarakat Desanya sendiri dan bertanggung jawab atas segala tugas yang diembannya. Mengingat Desa merupakan tempat segala urusan dari segenap unsur Pemerintah yang ada di atasnya maka seorang Kepala Desa berkewajiban menjalankan fungsi kepemimpinannya dalam masyarakat Desa.

Dalam mencapai tujuannya. Kepemimpinan adalah proses interpersonal yang mempengaruhi kegiatan orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan. Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok

organisasi masing-masing mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus di wujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial kelompok organisasi masyarakat (rivai, 2005:51).

5. Ekonomi Masyarakat

Upaya yang dilakukan oleh Desa Api – Api dalam meningkatkan Ekonomi Masyarakat adalah dengan pembangunan ekonomi desa hanya untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat. Kebijakan Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat khususnya penanam tanaman padi di Desa Api – Api, Kecamatan Bukit batu diantaranya dengan pemberian bantuan dan memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kebutuhan petani padi, seperti: pupuk, racun, mesin penggiling padi, dan peralatan lainnya.

Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, Pemerintah Desa Desa Api – Api bekerjasama dengan Dinas Pertanian dalam memberikan penyuluhan tentang sistem pola tanam padi, pemilihan bibit, penggunaan teknologi modern seperti mesin perontok padi serta perbaikan irigasi. sebelum diadakan penyuluhan-penyuluhan dari dinas pertanian masyarakat desa Sumberpasir sering mengalami masalah dalam memberantas hama serta pola tanam. Penyuluhan yang diberikan dinas pertanian sangat bermanfaat bagi para petani Desa Api - Api selain dapat menambah pengetahuan tentang pola tanam yang baik serta pemilihan bibit padi yang baik.

Desa Api – Api memiliki keunggulan dalam bidang ekonomi masyarakat,yaitu memiliki tanaman padi dengan luas 115

hektar, dengan nilai produksi pada tahun 2011 Rp. 105.000.000.

Hal ini petani yang ada di Desa Api-Api diberi kemudahan dalam hal permodalan melalui dana perkriditan rakyat yang dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang ada di Desa Api-Api sehingga petani bisa dengan mudah memperoleh modal dan cicilan dalam pembelian pupuk maupun obat.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan meningkatkan lagi kinerja Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP). Karena program ini sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Desa Api – Api ,melalui kucuran dana Rp 1 miliar pertahun tersebut, masyarakat bukan saja tidak lagi sulit mendapatkan modal usaha, tetapi juga dapat membantu berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan secara swadaya.

Pengelola UED SP ini harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, seperti cepat menyelesaikan persyaratan peminjaman, tidak lamban dalam mencairkan dana pinjaman. Keberadaan UED SP ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Api – Api, sehingga semangat kewirausahaan masyarakat semakin berkembang dan membantu perekonomian masyarakat.

Sebelum adanya Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) ini, kebanyakan dari masyarakat Desa melakukan peminjaman ke rentenir atau bank lain dengan bunga yang lebih tinggi dari Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP), sehingga akan merugikan masyarakat desa yang ingin berwirausaha.

Pemberdayaan

Masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan

masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat dan rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya. berdasarkan pendapat tersebut maka tujuan dari pemerintah desa Api-Api dalam meningkatkan keberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dicapai dengan pembinaan diberbagai bidang, dengan adanya pembinaan diharapkan masyarakat bisa menjadi mandiri dan mampu menyokong dirinya agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

Pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan pengertian pembangunan ekonomi, karena pada dasarnya baik tujuan pembangunan maupun pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bedanya pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat.

7.PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari Upaya Desa Api – Api Dalam Menjadi Desa Terbaik Se Kabupaten Bengkalis Tahun 2012, sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Api-Api telah menjalankan perannya dengan baik, yang dibuktikan dengan pencapaian menjadi Desa terbaik Se Kabupaten Bengkalis. hal ini dapat dilihat melalui,

Pertama sebagai pelaksana program-program yang menghasilkan beberapa program-program pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan, antara lain yaitu: Pengaktifan kelembagaan UPK (Unit Pengelola Keuangan), Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, Peningkatan ekonomi produktif. Kedua, sebagai pelaksana kebijakan, Ketiga, sebagai pembina kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai bidang seperti bidang ekonomi, bidang pelayanan kesehatan, bidang pendidikan. dan juga meningkatkan Pemerintah Desa, kelembagaan Desa. Melalui program-program tersebut pemerintah Desa Api-Api bisa memberdayakan masyarakatnya dengan baik dalam menunjang kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

2. Pemerintah Desa Api-Api mempunyai kerjasama yang baik antara pihak swasta dan masyarakat serta mempunyai anggaran dana yang baik dalam mendukung kelancaran pembangunan yang ada di Desa Api-Api.

Desa Api – Api telah berusaha dengan baik untuk menjadi Desa yang terbaik, baik itu Pemerintah Desa, Kelembagaan, maupun masyarakat sudah menjalankan dan berusaha dengan baik untuk membangun dan mengembangkan potensi yang ada di Desa Api – Api. Pemerintah Desa dan masyarakat sudah melihat kerja sama yang baik untuk membangun Desa menjadi yang terbaik. Walaupun masih ada terdapat kendala-kendala atau hambatan dalam meningkatkan dan membangun Desa, semua bisa di atasi dengan baik oleh Desa Api – Api.

b.Saran

Dari kesimpulan diatas, maka guna Upaya Desa Api – Api dalam Menjadi

Desa Terbaik Se Kabupaten Bengkalis yang berikutnya dan Desa yang memiliki potensi demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, penulis mencoba memberi beberapa saran antara lain :

1. Pemerintah Desa sebaiknya mampu membangun Desa lebih maju lagi, baik itu dari segi kesehatan, ekonomi, pendidikan, maupun Pemerintahan Desa.
2. Masyarakat harus bisa bekerja sama dengan Pemerintah Desa, supaya pembangunan, meningkatkan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat bisa berjalan dengan lancar dan baik, karena dengan kerja sama semua kendala atau hambatan bisa di atasi bersama.

Pemerintah Desa harus lebih mampu lagi memotivasi masyarakat dengan menyadarkan masyarakat bahwa setiap program-program yang dilaksanakan secara kerja sama akan dapat tercapainya visi dan misi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hagul, peter, 1985, *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, CV Radjawali, Jakarta.
- Hesel, Nogi . 2003. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Laperta.
- Hidayat, Syarifudin. 2002. *Metode Penelitian*. Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Hosio. 2007. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Jakarta :Laksbang.
- Inu Kencana, 2002, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung.
- Moleong, lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi, Hadari. 1999. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Penerbit Gajah Mada University

- Press, Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Penerbit Gajah Mada University Press, Bandung.
- Syafi'i, M. 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik*. Malang: Averroes Press.
- Sukandarrumidi. 2004. *Metode Penelitian. Penerbit Pustaka Pelajar*.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*, Kencana, Jakarta, 2005
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung : Mandar Maju.
- Peraturan perundang-undangan :**
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.